

SKRIPSI
YURISDIKSI *INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE* (ICJ)
MENGADILI GUGATAN AFRIKA SELATAN TERHADAP
ISRAEL TAHUN 2023

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NANDA RAHMI NADYAH

2010112189

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Dosen Pembimbing

Dr. Mardenis, S.H., M.Si.

Sri Asih Roza Nova, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

YURISDIKSI *INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE* (ICJ) MENGADILI GUGATAN AFRIKA SELATAN TERHADAP ISRAEL TAHUN 2023

(Nanda Rahmi Nadyah, 2010112189, Hukum Internasional, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 121 Halaman, 2024)

ABSTRAK

Konflik antara Israel dan Palestina kembali memanas pada 7 Oktober 2023 setelah Hamas menyerang wilayah Israel dan membuat Israel merespon tindakan tersebut dengan serangan balasan yang tidak henti-henti ke wilayah Gaza. Eskalasi kekerasan yang terjadi telah menimbulkan kerusakan fisik dan korban jiwa yang begitu besar terhadap rakyat Palestina. Dalam konteks ini, Afrika Selatan telah mengajukan gugatan dan permintaan untuk tindakan sementara kepada *International Court of Justice* (ICJ) terhadap Israel pada 29 Desember 2023 atas dugaan pelanggaran Konvensi Genosida 1948 di Jalur Gaza. Gugatan ini menimbulkan pertanyaan tentang yurisdiksi ICJ dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini akan berfokus pada dua hal. *Pertama*, bagaimana yurisdiksi *International Court of Justice* (ICJ) mengadili gugatan Afrika Selatan Terhadap Israel Tahun 2023? *Kedua*, Bagaimana implementasi putusan *International Court of Justice* (ICJ) terkait gugatan Afrika Selatan terhadap Israel Tahun 2023? Untuk menjawabnya, penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa gugatan yang diajukan Afrika Selatan merupakan luang lingkup dari *contentious jurisdiction* ICJ. Dalam hal ini gugatan Afrika Selatan telah memenuhi *ratione personae* ICJ berdasarkan pasal 93 ayat (1) Piagam PBB dan 34 Statuta ICJ serta memenuhi *ratione materiae* ICJ berdasarkan Pasal IX Konvensi Genosida. Dengan memenuhi kedua unsur tersebut, ICJ memiliki yurisdiksi *prima facie* untuk mengadili gugatan ini. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya putusan tindakan sementara atau *provisional measures* dalam sebuah *Order* pada 26 Januari 2024 berdasarkan Pasal 41 Statuta ICJ untuk mencegah risiko memburuknya kondisi di Gaza sambil menunggu keputusan akhir. Meskipun putusan sementara mengikat secara hukum internasional, hingga saat ini penegakan putusannya masih menjadi tantangan. Israel belum melaksanakan putusan tersebut dan ketergantungan penegakan putusan pada Dewan Keamanan sering kali tidak efektif karena adanya potensi penggunaan hak veto oleh anggota tetap. Dalam situasi ini, komitmen para pihak untuk mematuhi putusan dan kerja sama internasional menjadi sangat penting untuk memastikan implementasi putusan ICJ secara efektif untuk melindungi penduduk sipil di Gaza dan menegakkan prinsip-prinsip fundamental hukum internasional.

Kata kunci: ICJ, Yurisdiksi, Afrika Selatan, Israel, Konvensi Genosida 1948

**THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ)
ADJUDICATING THE APPLICATION OF SOUTH AFRICA AGAINST
ISRAEL IN 2023**

(Nanda Rahmi Nadyah, 2010112189, *International Law, Faculty of Law,*
Universitas Andalas, 121 Pages, 2024)

ABSTRACT

The conflict between Israel and Palestine reignited on October 7th, 2023, following an attack by Hamas on Israeli territory, which prompted Israel to launch relentless retaliatory strikes on Gaza. This escalation of violence has resulted in significant physical destruction and loss of life of the Palestinian people. In this context, South Africa has filed an application and request for provisional measures before the International Court of Justice (ICJ) against Israel on December 29, 2023 for alleged violations of the 1948 Genocide Convention in the Gaza Strip under Article 36 paragraph 1 of the ICJ Statute and Article IX of the Genocide Convention. This application raises questions about the implementation of the ICJ's jurisdiction in addressing the case. This study focuses on two main issues. First, how is the ICJ's jurisdiction regulated in international law? how is the implementation of ICJ jurisdiction in adjudicating South Africa's application against Israel in 2023? To address these questions, the study employs a normative legal method with a statutory and case approach. Data is collected through library research and analyzed qualitatively. The research concludes that the ICJ's jurisdiction is regulated under several international legal instruments, including Articles 92-96 of the UN Charter 1945, Articles 34-36, 41, and 65 of the ICJ Statute 1945, and the ICJ Rules of Court 1978 which govern procedural aspects of its implementation. These provisions serve as the legal basis for the ICJ to implement its prima facie jurisdiction in adjudicating South Africa's application against Israel regarding alleged violations of the Genocide Convention 1948 in the Gaza Strip, pursuant to Article IX of the Genocide Convention. This implementation is evidenced by the issuance of provisional measures, which affirms the ICJ's significant role in international law enforcement. However, Israel has not fully complied with these measures, given that the ICJ lacks executorial authority to directly enforce its decisions. The enforcement of ICJ decisions depends on the UN Security Council, which often faces obstacles due to the potential use of veto power by permanent members, rendering this mechanism less effective in ensuring parties' compliance with ICJ decisions.

Key words: *Jurisdiction, ICJ, Genocide Convention, South Africa, Israel*